

## **ABSTRAK**

Jalan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan prekonomian suatu bangsa, karena jalan dapat menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya melalui transportasi darat. Oleh sebab itu, Pemerintah harus memperhatikan fasilitas umum yang mendukung kelancaran berlalu lintas agar dapat meminimalisir kecelakaan akibat jalan yang tidak layak. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, salah satu tujuan diselenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah agar terwujudnya pelayanan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu.

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan akibat jalan yang tidak layak di Kota Semarang. Peneliti tertarik membahas apa saja kendala yang dihadapi dalam menangani kasus kecelakaan akibat jalan yang tidak layak di Kota Semarang dan apa saja upaya yang dilakukan pihak terkait dalam menangani kasus kecelakaan akibat jalan yang tidak layak.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer dilapangan. Spesifikasi dari penelitian ini menggunakan spesifikasi secara deskriptis analitis maksudnya dikaitkan dengan teori teori hukum yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek peneliti.

Perlindungan hukum bagi pengguna kendaraan bermotor dapat dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif yaitu menuntut pemerintah agar melaksanakan kewajibannya yaitu memperbaiki jalan yang tidak layak, dan perlindungan hukum represif yaitu menuntut pemerintah untuk mengganti kerugian pengemudi yang mengalami kecelakaan akibat jalan yang tidak layak. Kendala pihak yang terkait dalam menangani kasus kecelakaan akibat jalan yang tidak layak adalah antara lain sulitnya polisi dalam pengolahan TKP, ketidaktahuan masyarakat, dan keterbatasan Sumber daya manusia di Dinas Pekerjaan Umum.

Masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam berjalannya pemerintahan, oleh karena itu dibutuhkan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah harus dapat membenahi jalan yang tidak layak dengan cepat dan optimal agar dapat meminimalisir kecelakaan.

**Kata Kunci: Jalan, Jalan yang Tidak layak, kecelakaan**